

ABSTRAK

KAHLIL RAYHAN, MUHAMMAD. 2023: *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengadilan Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Melakukan Pengawasan Pendampingan Guna Menciptakan Kota Kediri Menjadi Kota Layak Anak*, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Drs. HA. Abd. Halim. MH., M.HI.

Kata Kunci:

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadilan Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam melakukan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak hanya melibatkan aspek pelayanan dan penyuluhan, tetapi juga melibatkan pengawasan dan pendampingan untuk menciptakan Kota Kediri yang layak bagi anak-anak. DP3AP2KB memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendampingi implementasi program-program yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Salah satu pengertian dari upaya DP3AP2KB adalah melalui pengawasan pendampingan. Maka dalam hal ini DP3AP2KB memiliki urgensi yang besar untuk memperkuat implementasi program-program yang ada, mengatasi hambatan yang mungkin muncul, dan menciptakan Kota Kediri yang benar-benar layak bagi anak-anak.

Dari Uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). kota kediri dalam meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak; (2) Bagaimana langkah pendampingan , pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota kediri mewujudkan kota layak anak; (3) Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota kediri mengimpletasikan kebijakan kota layak anak?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Pendekatan ini berusaha untuk menerangkan dan memberikan perspektif sebuah fenomena yang terdapat dalam hubungan subjek dan peneliti.

Hasil penelitian, yaitu: (1) Implementasi kota layak anak membutuhkan kerjasama lintas sektor dari pemerintah, LSM, lembaga swasta, dan masyarakat sipil. Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sangat diperlukan. (2) Peran DP3AP2KB secara menyeluruh adalah menyelenggarakan program kota layak anak dan pemenuhan hak-hak anak sedangkan pelaksanaan teknisnya di laksanakan oleh instansi-instansi yang terkait dalam pemenuhan hak-hak anak

seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, BAPPEDA, BAPEDA dan lain-lain. (3) Implementasi kebijakan kota layak anak Selama ini sudah baik tetapi masih perlu perhatian dan perbaikan terhadap implementasinya meskipun pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan penyuluhan, sosialisasi ataupun pembinaan tapi masih belum efektif karena pelaksanaannya tidak merata dan belum semuanya bisa sadar akan hal tersebut.

ABSTRACT

KAHLIL RAYHAN, MUHAMMAD. 2023: *Efforts of the Office of Women's Empowerment and Child Protection of the Population and Family Planning Court (DP3AP2KB) in supervising assistance to make Kediri City a Child-Friendly City, Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Economics, UIT Kediri, Supervisor Drs. HA. Abd. Halim. MH., M.HI.*

Keywords:

The efforts of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3AP2KB) in population control and family planning not only involve aspects of service and counseling, but also involve supervision and assistance to create a decent Kediri City for children. DP3AP2KB has an important role in overseeing and assisting the implementation of programs aimed at protecting women and children and controlling population growth. One of the definitions of DP3AP2KB efforts is through mentoring supervision. So in this case DP3AP2KB has a great urgency to strengthen the implementation of existing programs, overcome obstacles that may arise, and create a truly decent Kediri City for children.

From the description above, the following research problems can be formulated (1) How is the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB). Kediri City in minimizing violence against children; (2) How to assist and supervise the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Kediri City to realize a child-friendly city; (3) How are the efforts of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Kediri City to implement the child-friendly city policy?

This research is qualitative research. Qualitative research is a research process that is carried out reasonably and naturally in accordance with objective conditions in the field without manipulation. This approach seeks to explain and provide perspective on a phenomenon contained in the relationship of subject and researcher.

The results of the study, namely: (1) The implementation of child-friendly cities requires cross-sectoral cooperation from the government, NGOs, private institutions, and civil society. All parties must work together to create a better environment for children. Increasing public awareness about the importance of protecting and fulfilling children's rights is urgently needed. (2) Persan DP3AP2KB as a whole is organizing the child decent city program and the fulfillment of children's rights while the technical implementation is carried out by relevant agencies in fulfilling children's rights such as the Population and Civil Registration Office, Education Office, Health Office, Tourism Office, BAPPEDA, BAPEDA and others. (3) The implementation of the child-friendly city policy has been good but still needs attention and improvement to its implementation even

though the government and the Women's Empowerment and Child Protection Agency held counseling, socialization or guidance but it was still not effective because the implementation was uneven and not all of them could